



► ANTISIPASI COVID-19

Instansi Pemerintah Belum Gunakan Peduli Lindungi

Abdul Hamid Razak, Jumali, & Sirojul Khafid
redaksi@harianjogja.com

SLEMAN—Aplikasi *Peduli Lindungi* belum akan diterapkan di instansi lingkungan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak terganggu.

Sekda Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan Pemkab Sleman belum menerapkan penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* terutama di lingkungan organisasi perangkat daerah yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Aplikasi ini kan masih ada beberapa kendala, misalnya soal jaringan. Kami tidak mau ikut-ikutan pemerintah daerah lainnya yang sudah menerapkan penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi*,” kata Harda saat dihubungi *Harian Jogja*, Rabu (22/9).

Instansi Pemerintah...

Selain masalah jaringan, lanjut Harda, belum tentu masyarakat memiliki ponsel pintar yang bisa mengakses aplikasi tersebut atau familier dengan aplikasi tersebut. Jika itu terjadi, permohonan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dikhawatirkan dapat terganggu. Jika penerapan aplikasi ini dipaksakan, ia khawatir nanti mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kalau ada warga yang tidak dapat vaksin karena tidak memenuhi syarat, misalnya punya komorbid atau penyintas Covid-19, sementara ia membutuhkan pelayanan saat itu, apa iya ditolak? Kami tidak ingin kepentingan masyarakat terkendala, tidak terlayani," ujar Harda.

Alasan lain yang mendasari argumentasinya adalah capaian vaksinasi di Sleman. Saat ini, lanjut Harda vaksinasi Covid-19 di Sleman sudah mencapai 90% (untuk dosis pertama) dan Pemkab menargetkan 100% pada Oktober mendatang. Dengan capaian tersebut, maka masyarakat Sleman sebagian besar sudah divaksin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sleman, Susmiarto, menilai akan banyak kendala layanan Dukcapil yang akan dihadapi masyarakat jika aplikasi *Peduli Lindungi* diterapkan. "Kendala mungkin banyak. Contoh saya, saya sudah vaksin kedua. Ketika buka sertifikasi vaksin enggak bisa, tapi muncul info sudah vaksin dosis kedua. Saya sudah lapor tempat vaksin RSUD, tapi ya belum berubah," kata Susmiarto.

Ia khawatir jika aplikasi *Peduli Lindungi* ini diterapkan di Dukcapil masyarakat yang akan mengakses pelayanan

kependudukan bisa tidak terlayani dengan baik.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Pemkab Bantul. Panewu Sanden, Bantul, Deni Ngajis Hartono, mengatakan belum ada perintah untuk menerapkan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk pengunjung yang hendak melakukan pelayanan publik. "Kami belum terapkan. Selain itu, kami juga belum ada *barcode* [QR Code] untuk aplikasi tersebut," katanya.

Hal sama juga terjadi di Disdukcapil Bantul. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Bantul, Emy Nikmawati, mengaku belum ada rencana menerapkan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk pengunjung. "Karena dari Ditjen Adminduk juga belum ada perintah menerapkan aplikasi tersebut. Kami juga belum ada *barcode* untuk *scan Peduli Lindungi*," kata Emy.

Di Kota Jogja, rencana penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* di kawasan Kemantren sempat muncul saat rapat dengan Asisten Kesra. Menurut Mantri Pamong Praja Gedongtengen, Ananto Wibowo, ada konsekuensi penerapan QR Code untuk aplikasi yang bisa menunjukkan bukti sudah vaksin tersebut. Apabila ada warga yang belum vaksin dan hendak masuk ke kantor kemantren, perlu ada solusi.

"Seperti masuk kompleks Balai Kota wajib vaksin, bagi yang belum vaksin langsung dilayani di tempat [dengan mobil vaksin]. Kemantren belum bisa melayani di tempat, tetap harus di fasilitas kesehatan yang menyediakan," kata Ananto, Rabu. "Kalau itu diterapkan, kasihan warga yang butuh

pelayanan mendadak."

Secara sarana prasarana, kemantren sudah siap menerapkan penggunaan aplikasi ini. Walaupun kemungkinan ada pengecualian bagi yang membutuhkan pelayanan darurat.

Hidupkan Pariwisata

Kendati di kantor pemerintahan *Peduli Lindungi* tak diterapkan, namun aplikasi ini dijadikan syarat untuk pembukaan sektor wisata, pusat perbelanjaan, dan privat seperti perkantoran.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sleman, Joko Paromo menyambut baik penerapan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk hotel dan restoran, sebagai upaya menghidupkan lagi pariwisata.

Ia menyebutkan hotel dan restoran di Sleman sudah berupaya menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* sejak sebulan terakhir. Namun, baru dua hari terakhir mereka berhasil mengaksesnya. "Aturan menggunakan *Peduli Lindungi* itu bagus," kata Joko.

Setelah ini, proses penggunaan aplikasi ini masih uji coba dan ia memperkirakan baru sebulan ke depan bisa diterapkan secara maksimal. Joko mengapresiasi upaya pemerintah membuka kembali pariwisata dengan aplikasi *Peduli Lindungi*. Menurutnya, hotel dan resto pun akan berupaya mengikuti aturan tersebut.

Jumlah hotel dan restoran yang menjadi anggota PHRI Sleman sebanyak 90 usaha. Di luar itu, masih ada ratusan hotel dan restoran yang belum bergabung. Joko menambahkan sudah sepekan terakhir pariwisata mulai menggeliat sehingga usaha hotel dan restoran mulai naik 10%-15%. (Nina Atmasari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Dinas Kesehatan 3. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005